KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Enam menteri antarkan RUU BPIP
Tanggal : Jumat, 17 Juli 2020
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

Enam Menteri Antarkan RUU BPIP

Nasib RUU HIP masih akan dibahas pada periode sidang mendatang.

■ RONGGO ASTUNGKORO, FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengutus enam menteri sekaligus ke Kompleks Parlemen Senayan untuk menyampaikan sikap atas polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain mendorong penundaan pembahasan RUU tersebut, pemerintah juga menawarkan RUU baru, yakni RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Rombongan yang diujungtombaki Menko Polhukam Mahfud MD tersebut juga menyertakan Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebelum menuju DPR, kelima menteri itu berkumpul terlebih dahulu di kantor Kemenko Polhukam.

"Saya membawa surat presiden yang berisi tiga dokumen. Satu dokumen surat resmi dari Presiden (Joko Widodo) kepada Ibu Ketua DPR (Puan Maharani) secara resmi untuk sampai ke DPR," ujar Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Selain itu, menurut Mahfud, ia juga menyerahkan draf RUU BPIP dan daftar inventaris masalah (DIM) RUU tersebut. Mahfud menambahkan, UU BPIP merupakan bentuk respons atas penolakan di masyarakat terhadap RUU HIP. Di antaranya, dalam RUU BPIP terdapat TAP MPRS Nomor XXV/1966 sebagai konsiderans kedua setelah UUD 1945. TAP MPRS yang tak dipakai sebagai konsiderans di RUU HIP itu mengatur larangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme.

"Yang kedua, perumusan Pancasila kita kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno pada 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan lima sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan napas pemahaman," kata dia. Sementara, dalam RUU HIP dicantumkan pasal berisi usulan pemerasan Pancasila menjadi Trisila, bahkan Ekasila dengan sila tunggal "Gotong Royong".

RUU HIP diusulkan Fraksi PDIP. Salah satu tujuannya memang memperkuat landasan hukum pembentukan BPIP yang selama ini diatur peraturan presiden. Salah satu pimpinan badan itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pembina.

BERITA TERKAIT
RUU HIP Mestinya Dicabut
Hlm- 9

Rencana pembahasan RUU HIP dimulai dengan rapat dengar pendapat umum pada 11 Februari 2020. Rapat paripurna DPR menyetujui RUU HIP menjadi usul inisiatif dan masuk Program Legislasi Nasional pada 12 Mei. Fraksi PKS menolak pembahasan karena keberatan dengan substansi RUU, sedangkan Fraksi Demokrat menolak sehubungan kondisi pandemi.

Belakangan, penolakan RUU HIP oleh ormas-ormas Islam mengemuka sehubungan persepsi adanya penyempitan makna Pancasila dan upaya melonggarkan larangan atas komunisme.

Seluruh fraksi yang sempat mendukung RUU itu, kecuali PDIP, berbalik menolak. Di ujung polemik itu, politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka yang mengetuai Panja RUU HIP dipindahkan dari posnya di Badan Legislatif DPR.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, RUU yang baru disodorkan pemerintah tersebut berbeda dengan RUU HIP. "Yaitu, berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan.

Puan menjabarkan, RUU BPIP terdiri atas 7 bab dan 17 pasal, sedangkan RUU HIP berisikan 10 bab dan 60 pasal. Dari sisi substansi, Puan menjelaskan, pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. "Sementara, pasal-pasal kontroversial, seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain, sudah tidak ada lagi," ujar Puan.

DPR dan pemerintah juga sepakat, konsep RUU BPIP ini tidak akan dibahas dalam waktu dekat. "Tetapi, akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap DIM RUU BPIP tersebut," katanya menjelaskan. Puan berharap, pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi akibat RUU HIP dapat diakhiri.

Penyampaian RUU BPIP kemarin berbarengan dengan rapat paripurna penutupan masa sidang ke-IV Masa Sidang 2019-2020. Meski begitu, RUU HIP yang sudah ditawarkan alternatifnya tersebut masih tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Pimpinan DPR berkilah nasib RUU HIP akan ditentukan dalam masa sidang berikutnya. "Mekanisme akan dibicarakan apakah dicabut atau penggantinya ini akan diatur masa sidang depan dan walau diganti dengan (RUU) BPIP yang hanya mengatur lembaga," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (16/7).

Dasco mengatakan, DPR tidak akan membahas RUU HIP dan RUU BPIP sebelum menerima masukan yang komplet dari masyarakat. ■ nawir arsyad akbar **ed:** fitriyan zamzami